



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 781 /B.07/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/552/B.07/HK/2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-12-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 761/B.07/HK/2022
 TANGGAL : 19-12-2022

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIS DPRD	1	1,421	1	0	A		
2	- ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	0	3,073	3	(3)	A		
3	- ANALIS HUKUM AHLI MUDA	0	2,823	3	(3)	A		
4	- ANALIS HUKUM AHLI MADYA	0	1,599	2	(2)	A		
5	- PERENCANA AHLI PERTAMA	0	3,67	4	(4)	A		
6	- PERENCANA AHLI MUDA	3	4,077	4	(1)	A		
7	- PERENCANA AHLI MADYA	0	2,47	2	(2)	A		
8	- ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	0	4,293	4	(4)	A		
9	- ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	2	4,967	5	(3)	A		
10	- ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA	0	2,624	3	(3)	A		
11	- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	0	5,129	5	(5)	A		
12	- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	0	3,703	4	(4)	A		
13	- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	0	3,515	4	(4)	A		
14	- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	3	3,682	4	(1)	A		
15	- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	0	2,142	2	(2)	A		
16	- ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	0	4,362	4	(4)	A		
17	- ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	0	2,505	3	(3)	A		
18	- ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	0	2,116	2	(2)	A		
19	- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	0	5,497	5	(5)	A		
20	- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	0	5,497	5	(5)	A		
21	- PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	0	3,37	3	(3)	A		
22	- PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	1	3,682	4	(3)	A		
23	- PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1	3,686	4	(3)	A		
24	- PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	0	2,394	2	(2)	A		
25	- PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	0	3,024	3	(3)	A		
26	- PUSTAKAWAN AHLI MUDA	1	1,794	2	(1)	A		
27	- PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	1	5,855	6	(5)	A		
28	- PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	2	3,694	4	(2)	A		
29	- PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	0	2,006	2	(2)	A		
30	- ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PELAKSANA TERAMPIL	0	5,743	6	(6)	A		
31	- ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	0	4,947	5	(5)	A		
32	- ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA	0	4,435	4	(4)	A		
33	- PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	0	3,007	3	(3)	A		
34	- PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	0	2,508	3	(3)	A		
35	- PRANATA KOMPUTER PENYELIA	0	3,569	4	(4)	A		
36	- PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	0	3,506	4	(4)	A		
37	- PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	0	3,416	3	(3)	A		
38	- PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	0	3,283	3	(3)	A		
39	- PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA/TERAMPIL	0	3,467	3	(3)	A		
40	- PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	0	3,545	4	(4)	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (E-J)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	- PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	0	3,496	3	(3)	A		
42	- ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	0	4,861	5	(5)	A		
43	- ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	0	4,57	5	(5)	A		
44	- ARSIPARIS PENYELIA	0	4,291	4	(4)	A		
45	- ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	3,645	4	(4)	A		
46	- ARSIPARIS AHLI MUDA	0	3,936	4	(4)	A		
47	- PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA/TERAMPIL (ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA/TERAMPIL)	0	0,958	1	(1)	B		
48	- PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR (ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR)	0	1,783	2	(2)	A		
49	- PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA (ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA)	0	0,542	1	(1)	D		
50	- ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA)	0	3,486	3	(3)	A		
51	- ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA)	0	3,483	3	(3)	A		
52	- ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA)	0	2,086	2	(2)	A		
53	- KEPALA BAGIAN UMUM	1	1,233	1	0	A	2,384	A
54	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	1	1,041	1	0	A		
55	- ANALIS TATA USAHA	1	1,649	2	(1)	A		
56	- PENYUSUN ADMINISTRASI PEGAWAI LEGISLATIF	1	1,993	2	(1)	A		
57	- PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	1,395	1	(1)	A		
58	- PENGELOLA DATA	1	1,475	1	0	A		
59	- PENGADMINISTRASI UMUM	3	3,371	3	0	A		
60	- PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	4,862	5	(4)	A		
61	- ANALIS ASET DAERAH	1	2,226	2	(1)	A		
62	- PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	4	2,691	3	1	A		
63	- ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	2,794	3	(3)	A		
64	- TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	2	2,73	3	(1)	A		
65	- KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1	1,295	1	0	A	2,624	A
66	- ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	4	5,381	5	(1)	A		
67	- ANALIS LAPORAN KEUANGAN	2	4,101	4	(2)	A		
68	- ANALIS KEUANGAN	2	3,06	3	(1)	A		
69	- BENDAHARA	0	1,468	1	(1)	A		
70	- PENGELOLA PERJALANAN DINAS	0	1,477	1	(1)	A		
71	- PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	1	1,38	1	0	A		
72	- PENGADMINISTRASI KEUANGAN	3	2,585	3	0	A		
73	- PENGADMINISTRASI ANGGARAN	2	1,542	2	0	A		
74	- KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	1	1,208	1	0	A	7,178	A
75	- ANALIS LAYANAN UMUM	5	5,586	6	(1)	A		
76	- PENYUSUN RISALAH	1	6,077	6	(5)	A		
77	- PENGADMINISTRASI RISALAH	1	6,041	6	(5)	A		
78	- PENYUSUN KESEKRETARIATAN FRAKSI	8	8,408	8	0	A		
79	- PENGADMINISTRASI UMUM	3	5,869	6	(3)	A		
80	- ANALIS PELAYANAN	6	9,632	10	(4)	A		
81	- ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	10,12	10	(3)	A		
82	- PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	9	5,691	6	3	A		
83	- KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN	1	1,298	1	0	A	1,608	A
84	- ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	1	2,528	3	(2)	A		
85	- ANALIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	4	3,396	3	1	A		

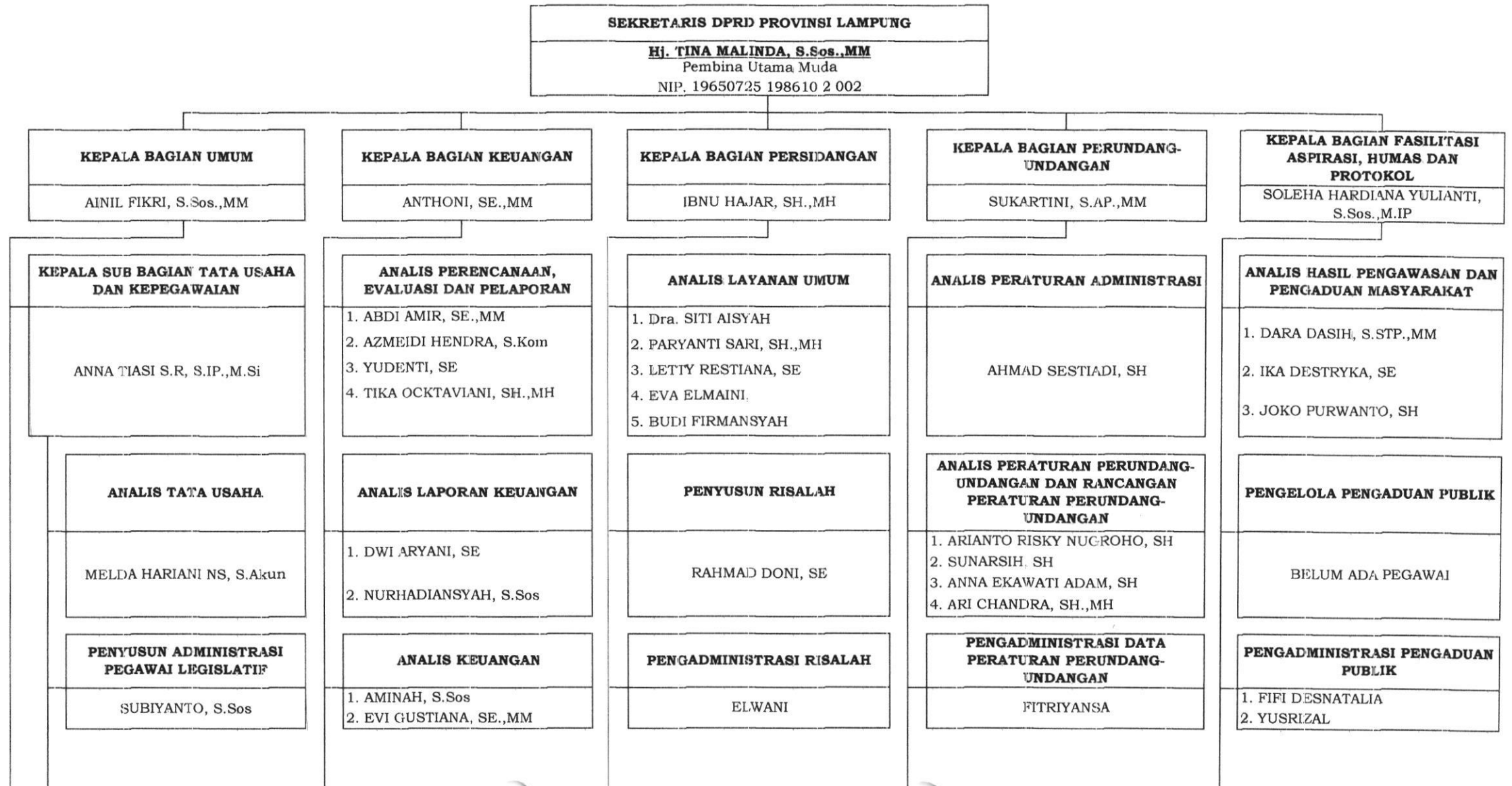
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	- PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	1,139	1	0	A		
87	- ANALIS DATA DAN INFORMASI	2	1,002	1	1	A		
88	- PENGELOLA PERPUSTAKAAN	0	1,383	1	(1)	A		
89	- PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	1,024	1	0	A		
90	- ANALIS PUBLIKASI	1	1,568	2	(1)	A		
91	- PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	1	1,392	1	0	A		
92	- PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	1	1,037	1	0	A		
93	- KEPALA BAGIAN FASILITASI ASPIRASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1	1,235	1	0	A	3,665	A
94	- ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	3	3,223	3	0	A		
95	- PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	0	1,326	1	(1)	A		
96	- PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK	2	2,8	3	(1)	A		
97	- ANALIS PUBLIKASI	2	3,321	3	(1)	A		
98	- PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	1	3,469	3	(2)	A		
99	- PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA	0	2,829	3	(3)	A		
100	- ANALIS PROTOKOL	7	6,918	7	0	A		
101	- PRANATA ACARA	0	2,246	2	(2)	A		
102	- PENGADMINISTRASI UMUM	5	6,849	7	(2)	A		
Jumlah		121	335,5977	333	(212)		17,459	A

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

**2.1 PETA JABATAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG**



PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BENDAHARA	PENYUSUN KESEKRETARIATAN FRAKSI	ANALIS DATA DAN INFORMASI	ANALIS PUBLIKASI
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	1. YULI SALTIN, S.Pd 2. SRI MUNINGSIH, SH 3. WAN INCI SITI AININ SH 4. DESSY ISTIARINI SH 5. ROMILA, SE 6. M.PRABANDARI, SH 7. ACHMAD CHAIRUN A, S.St.Pi.,MH 8. ABDUL RACHMAN, SH	1. MONA MONICA ANDRIANI, S.S 2. ABDUL HARIS, SH	1. DEDDY KURNIAWAN, S.Sos 2. SUTANTO, SE
PENGELOLA DATA	PENGELOLA PERJALANAN DINAS	PENGADMINISTRASI UMUM	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM
SITI CHAIRUNISSA, A.Md	BELUM ADA PEGAWAI	1. NOVERIA 2. METEOR SAMSUDIN 3. YUNERI	BELUM ADA PEGAWAI	INGE IMMELIA, SE.,MM
PENGADMINISTRASI UMUM	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANALIS PELAYANAN	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
1. AGUS SETIAWAN 2. JAMSURI AMRAN 3. SAMIASIH	SAHARA	1. NASORI AMIN, S.Sos 2. HERYANTI FITRI, S.Sos.,MM 3. RISMAWATI, S.Sos 4. HARUN RASYID, S.Ag 5. RICHQ, S.STP 6. SONI WIJAYA, SE.,MM	HENDRA	BELUM ADA PEGAWAI
PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	ANALIS DATA DAN INFORMASI	ANALIS PUBLIKASI	ANALIS PROTOKOL
SAYU KADE WAHYU ARIYANI, ST	1. IMAM SANTOSO NM 2. RETNO HANDAYANI 3. ARYATI	1. ROHALIM, S.Sos 2. NAZIRHAN SH 3. GITA PANLELA, SE 4. TRI AGUSTINA, SE 5. MELIA SANTI, SH 6. REIN MARTIN, SE.,M.Si 7. A.FARADHITYA MARSHA, S.STP	BAY KARIM, SH	1. EMILDASARI ASTUTI, S.Sos 2. PARIANTAMA, SE.,MM 3. BAMBANG ADIWIJAYA, S.KoM 4. HARI AGUSMAN, SH 5. MUHAMAD FIRMANSYAH, SE 6. ERWIN M. IKHSAN, SH 7. FERDINAN INDIARTO, SH
ANALIS ASET DAERAH	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	PRANATA ACARA
KUSNADI, S.Sos	1. YUSMANTO S.A.P 2. FERDYAN RICARDO	1. RUDI OKTAVIA 2. HERMANSYAH BS 3. SUGIANTO 4. BENI MULIA 5. ALI SADIKIN 6. RISTIAWAN 7. HERMANSYAH 8. PANTO WILOPO 9. FAUZIAH	EVI MURLIATI, BA	BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

1. ERNAWATI
2. SANTI NORITA
3. TUGI WALUYO
4. MOHAMAD DAMANHURI

ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BELUM ADA PEGAWAI

TEKNISI SARANA DAN PRASARANA

1. ROSNAWI
2. RIDUAN

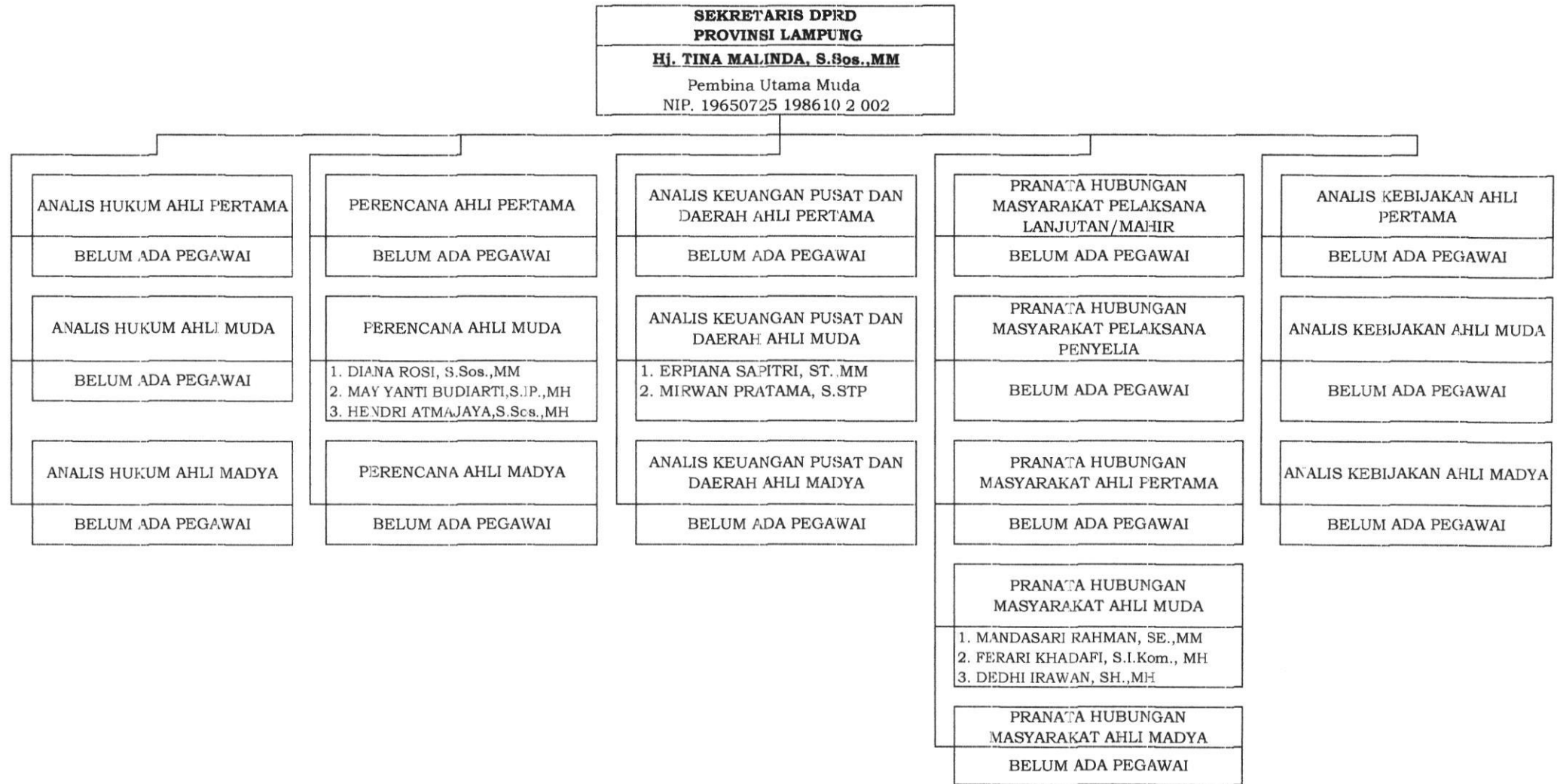
PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

REBUDIN

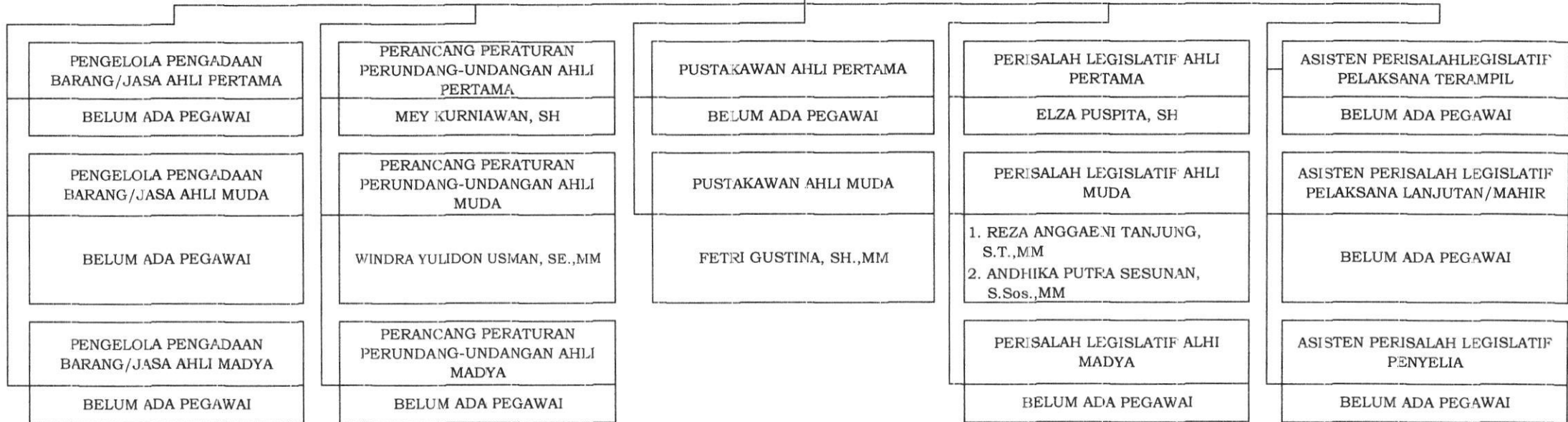
PENGADMINISTRASI UMUM

1. MANSUR
2. SYARIF HIDAYAT
3. VERRY ARYAN
4. AIDA MUSTAFA
5. BENI MUSTOFA

**2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG**
Hj. TINA MALINDA, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002



**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG**
Hj. TINA MALINDA, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002

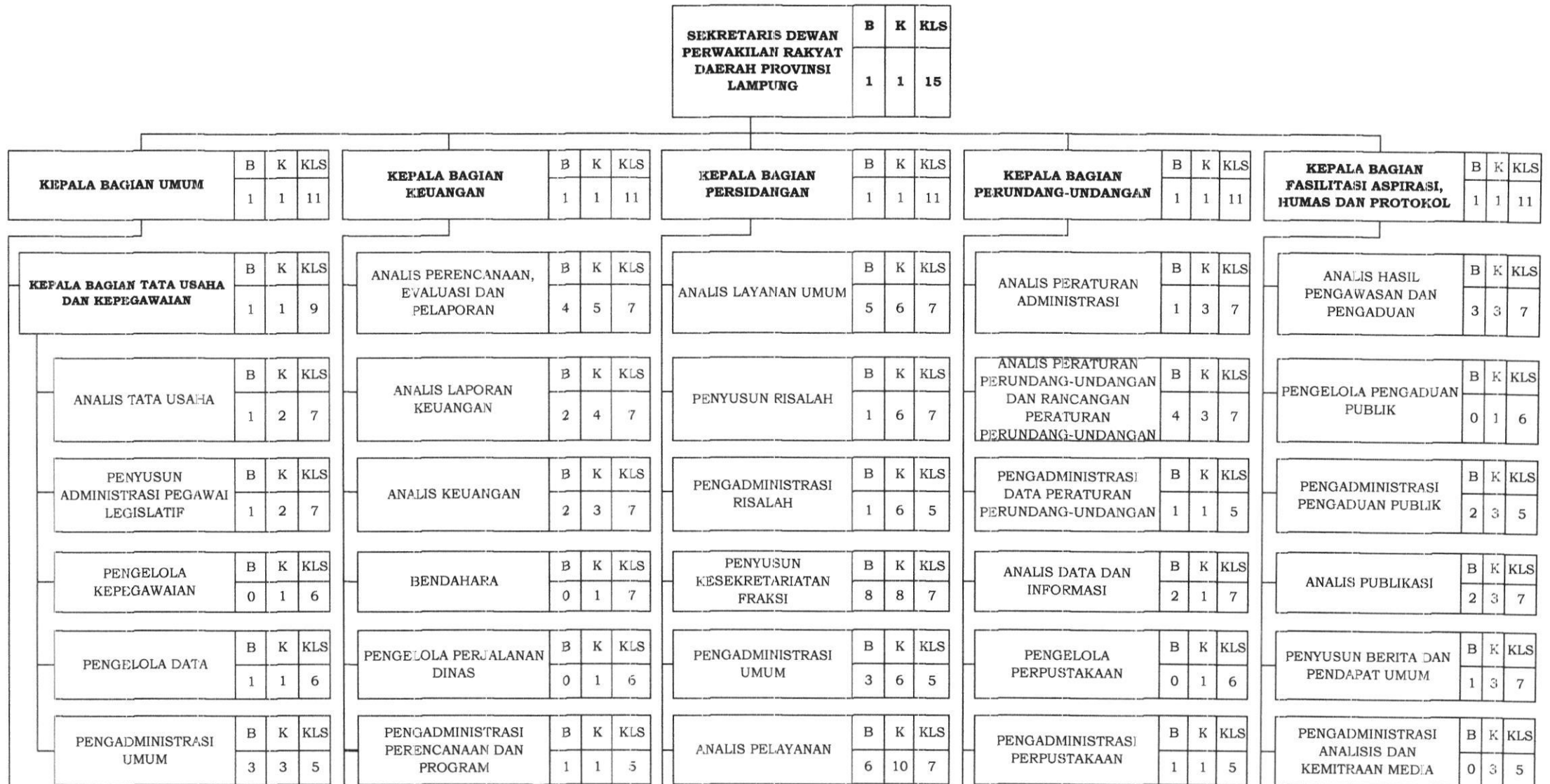
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA/TERAMPIL	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	PENATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA/ TERAMPIL (ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA/TERAMPIL)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA)
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	PENATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSAN LANJUTAN/MAHIR (ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA)
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	ARSIPARIS PENYELIA	PENATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA (ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA)
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		ARSIPARIS AHLI PERTAMA		
BELUM ADA PEGAWAI		BELUM ADA PEGAWAI		
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA		ARSIPARIS AHLI MUDA		
BELUM ADA PEGAWAI		BELUM ADA PEGAWAI		
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA				
BELUM ADA PEGAWAI				

GUBERNUR LAMPUNG,



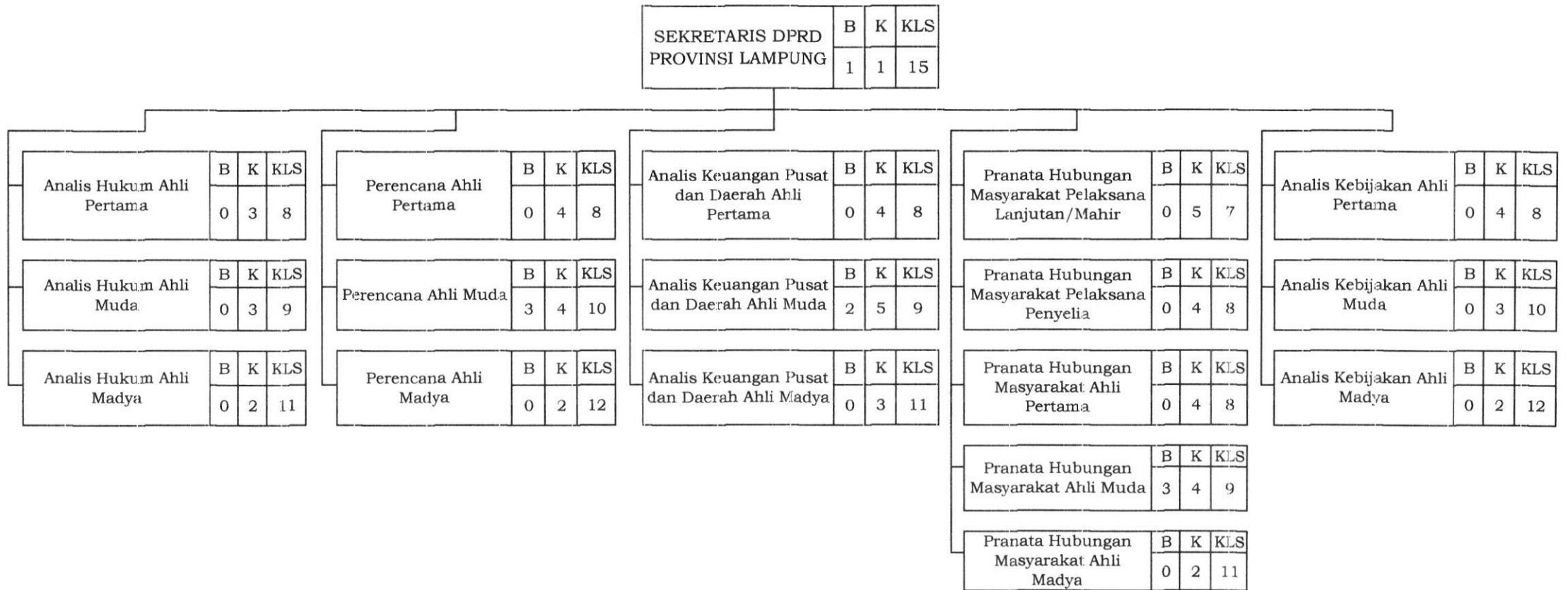
ARINAL DJUNAI DI

**3.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

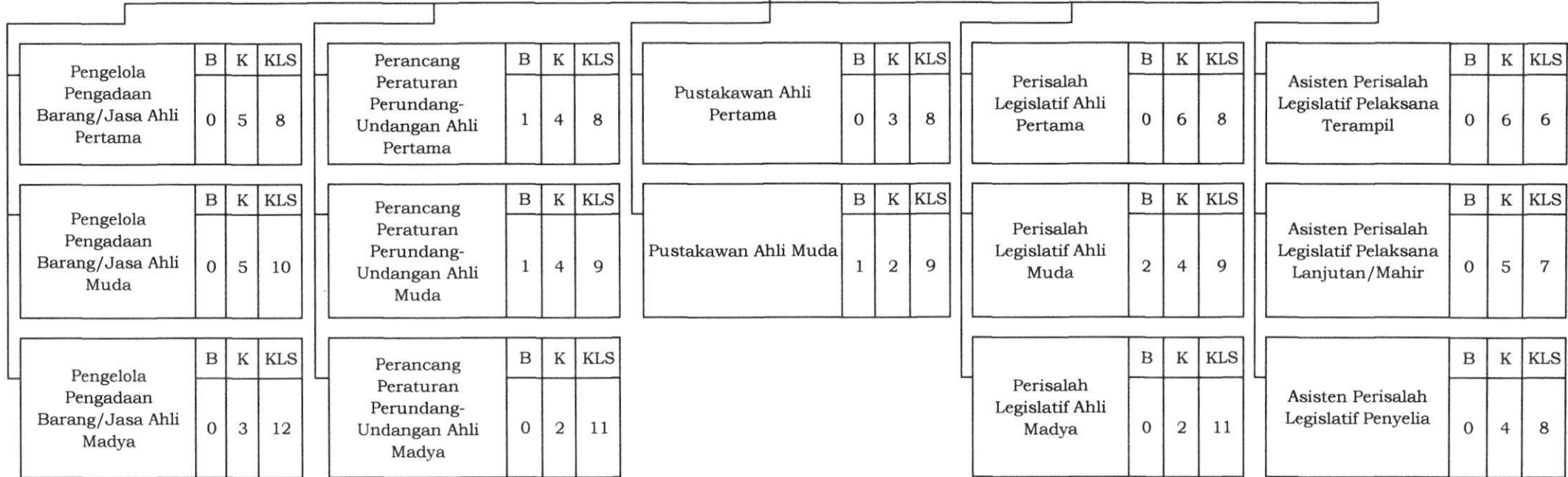


PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	B	K	KLS
	1	5	7
ANALIS ASET DAERAH	B	K	KLS
	1	2	7
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	B	K	KLS
	4	3	5
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	B	K	KLS
	0	3	7
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	B	K	KLS
	2	3	5
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	B	K	KLS
	3	3	5
PENGADMINISTRASI ANGGARAN	B	K	KLS
	2	2	5
ANALIS DATA DAN INFORMASI	B	K	KLS
	7	10	7
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	B	K	KLS
	9	6	5
ANALIS PUBLIKASI	B	K	KLS
	1	2	7
PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	B	K	KLS
	1	1	6
PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	B	K	KLS
	1	1	5
ANALIS PROTOKOL	B	K	KLS
	7	7	7
PRANATA ACARA	B	K	KLS
	0	2	6
PENGADMINISTRASI UMUM	B	K	KLS
	5	7	5

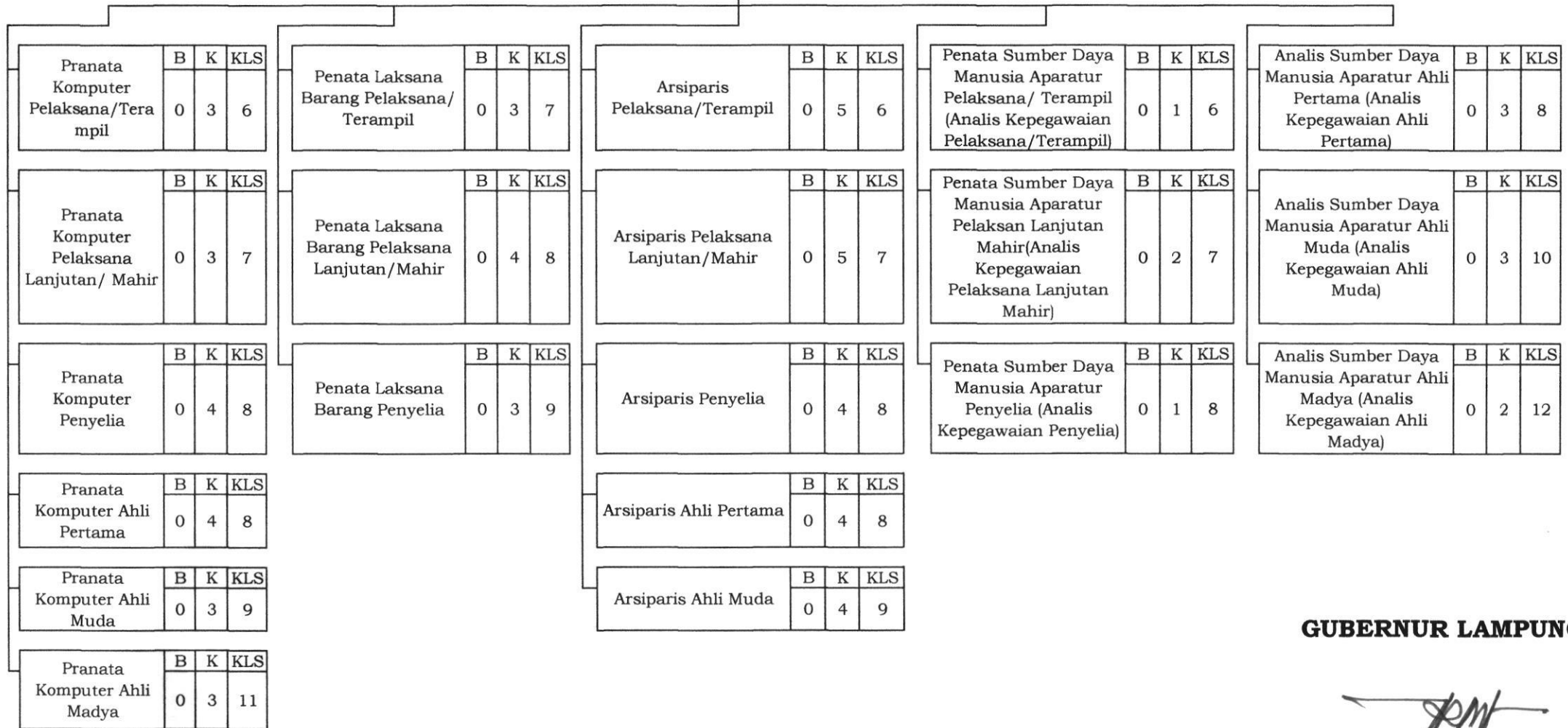
**3.2 PETA EVALUASI JABATAN HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG	B	K	KLS
	1	1	15



SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG	B	K	KLS
	1	1	15



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI